

INDONESIA DAN KONSEPSI NEGARA AGRARIS

Lailatussyukriah

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Samudra, Langsa

email: lailatussyukriyah@yahoo.co.id

Abstraksi

Historiografi adalah sebuah produk tulisan yang dibangun dengan sudut pandang tertentu berdasarkan nilai-nilai yang melingkupinya. Sudut pandang tersebut kemudian diwacanakan menjadi sebuah sistem pengajaran yang disampaikan kepada tiap generasi.

Konsep Negara Indonesia yang agraris adalah sebuah doktrin yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terutama sejak masuknya sistem ekonomi perkebunan di Nusantara. Konsep tersebut telah menjauhkan jati diri bangsa Indonesia terhadap warisan tradisi leluhur sebagai bangsa maritime. Bangsa Indonesia karena terlalu sibuk mengurus masalah-masalah agraris seolah lupa kepada kedaulatan wilayah lautnya yang begitu luas.

Pengajaran sejarah di Indonesia harus berani mengubah konsep Indonesia yang agraris menjadi konsep Indonesia sebagai Negara maritime berdasarkan fakta historis selama berabad-abad, jauh sebelum masuknya kolonialisasi.

Kata Kunci: *konsep Negara agraris, wacana colonial, pengajaran sejarah di Indonesia.*

Abstract

Historiography is a script product has been building by specific value. The value has been discoursing in the teaching of history to each generation.

Discourse of agricultural Indonesian state is a doctrine has been building by Dutch colonialism, more rapidly since the era of economic plantation. The conception had been keep away Indonesian national character building from the ancestor's heritage based on maritime. Indonesian has been forgetting the tradition of maritime because of the doctrine of agricultural state.

History teaching in Indonesia must be change the conception of agricultural state became maritime state based on long tradition of historical fact, long time before the colonial era.

Key Word: *the concept of agricultural state, colonial discourse, history teaching in Indonesia*

I. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Sejarah bersifat ideografis, yaitu merupakan kumpulan fakta-fakta masa lalu untuk direkonstruksi menjadi sebuah kesatuan ide dalam bentuk historiografi. Begitu banyaknya rangkaian peristiwa masa lalu yang tersebar dalam berbagai sumber, baik dokumen, manuskrip, surat kabar, buku, laporan, hingga tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat, menjadikan ide-ide penulisan sejarah menjadi terbatas untuk dikemukakan secara keseluruhan, mengingat begitu banyaknya fakta-fakta yang memerlukan untuk segera dituliskan.

Bagaimana seharusnya sejarah ditulis, adalah sebuah permasalahan besar dalam kajian historiografi di Indonesia terutama menyangkut dengan kurikulum/ bahan ajar sejarah disekolah-sekolah. Pada hakekatnya dalam pembentukan suatu nasion ada faktor-faktor historis dan kompleks sifatnya. Negara nasion sebagai organisasi politik dari bangsa Indonesia tidak lain merupakan suatu produk historis dan hanya ditaksir kembali seluruh perkembangan berbagai kehidupan politik kultural yang berlangsung dikepulauan Nusantara pada masa lampau. Sejarah Indonesia perlu mengungkapkan bagaimana secara progresif unsur-unsur yang beraneka ragam berkembang kearah kesatuan dan dari abad ke abad menunjukkan derajat integrasi yang semakin tinggi, dan akhirnya mencapai kulminasi dalam pembentukan negara nasion Republik Indonesia (Sartono Kartodirjo: 1974). Historiografi Indonesia barangkali memerlukan sebuah identitas khusus yang dapat dijadikan media untuk membangun karakter bangsa. Sejarah juga dapat digunakan sebagai ideologisasi atau doktrin untuk memperkuat identitas

nasional, seperti yang pernah dilakukan Soeharto dan rezim Orde Barunya, namun gagal. Keberadaan historiografi Nasional ini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk menentukan identitas bangsa dalam label Sejarah Nasional (Bambang Purwanto: 2006).

Pada dasarnya kajian singkat ini membicarakan tentang ide-ide dari historiografi di Indonesia yang akan menjadi tema sentral dalam pengajaran sejarah nasional. Maria Grever dan Siep Stuurman dalam *Beyond the Canon History for The Twenty First Century* mengemukakan bagaimana 'kanon' menjadi permasalahan kita sekarang. Saat ini banyak sejawawan memahami bahwa bangsa-bangsa dan negara bangsa adalah 'tradisi-tradisi temuan' dan bidang-bidang muatan daripada mempertahankan perhitungan realitas-realitas. Akibatnya, kebanyakan sejarawan akademi sekarang ini mengalami ambivalensi, sering ironi, dalam bersikap terhadap 'kanon' nasional. Mereka dapat saja mengatakan, mungkin kita selalu membutuhkannya untuk mengajar sejarah disekolah, tetapi sesuatu yang pertama kali kita ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas adalah bahwa sesuatu itu tidak benar-benar terjadi seperti itu dan bahwa sejarah bangsa selalu membandingkan suatu sejarah persaingan narasi nasional yang berhubungan dengan agenda-agenda politik untuk pembangunan nasional. Mengapa basis dasar ini tidak direncanakan secara jelas untuk murid-murid sekolah tinggi?

Grever dan Stuurman juga menambahkan ada dua sisi dari kenyataan penting tren-tren baru dalam sejarah,

1. Negara tidaklah kehilangan posisi istimewanya. Hal tersebut sekarang hanya satu objek dari penelitian-

penelitian sejarah antara satu dengan yang lainnya.

2. Tren-tren baru dalam sejarah, sebagaimana perkembangan sejarah dunia dan konteks global dari semua penelitian dan penulisan sejarah membutuhkan sebuah kritik revisi dari historiografi nasional yang ada.

Dalam kajian ini akan dibahas bagaimana historiografi di Indonesia dibangun oleh 'kanon' warisan kolonial Belanda yang memunculkan bentuk 'tren' baru dalam penulisan sejarah. Nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai yang sengaja diformulasikan sebagai antitesa terhadap dominasi kolonialisme Belanda oleh sekelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki identitas masing-masing yang terpisah (Bambang Purwanto: 2006). Tulisan ini akan membahas beberapa poin tentang mainstream berpikir masyarakat dan dunia akademisi di Indonesia yang dibangun oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi, dan secara tidak disadari menjadi 'kanon' pemerintah kolonial.

II. Konsep Negara Agraris: Diskursus Pengajaran Sejarah di Indonesia dan Tradisi Penulisan Akademis

Konsep-konsep tentang negara agraris secara sadar ataupun tidak sadar telah ditanamkan sejak usia dini. Indonesia adalah gambaran negeri yang subur makmur, *gemah ripah loh jinawi*, tongkat ditanam tumbuh jadi pohon. Sejak zaman Orde Baru, terutama, buku-buku pelajaran disekolah dari tingkat satu Sekolah Dasar hampir selalu menampilkan ilustrasi sapi sedang membajak sawah, pak tani sedang mencangkul tanah, Wati sedang berkebun, desaku yang permai dan sebagainya. Bahkan, anak-anak TK -sebagaimana

pernah disampaikan Prof. Dr. Bambang Purwanto dalam kuliah Kapita Selekta- apabila diberi tugas menggambar, hampir dapat dipastikan mayoritas dari mereka akan memilih menggambar pemandangan gunung, matahari terbit, dan sawah. Anak-anak perempuan terkadang suka menggambar bunga dan pepohonan. Alasan anak-anak tersebut menggambar sawah dan gunung, tentu saja bukan semata karena menggambar kapal, laut, dan ikan lebih sulit. Disinilah indoktrinasi memori kolektif telah diwariskan dari guru-guru mereka selama ratusan tahun. Pada waktu menginjak bangku SMP, pelajaran sejarah tingkat awal tidak lupa memberikan hafalan-hafalan diluar kepala tentang fase-fase perkembangan manusia 'pra-sejarah' dari zaman batu, berburu, meramu, bercocok tanam hingga ladang pertanian berpindah. Pelajaran sejarah tentang masa kolonialpun, selalu mengeksploitasi periode tanam paksa pada masa pemerintah Hindia Belanda dengan memberikan gambaran-gambaran penderitaan penduduk pribumi akibat kebijakan tersebut, serta menerangkan 'dampak baik' dari cultuurstelsel berupa pengenalan jenis-jenis tanaman produksi terhadap perkembangan sistem pertanian di Indonesia. Mata pelajaran Pertanian dimasukkan sebagai kurikulum tambahan disekolah-sekolah umum, hingga ditingkat Perguruan Tinggi pun hampir setiap Universitas membuka Fakultas-fakultas Pertanian dengan berbagai macam pilihan prodi. Fakta-fakta tersebut cukup menjelaskan gambaran betapa sangat mendasarnya sektor pertanian dalam membangun setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia yang telah menjadi budaya dan tradisi masyarakatnya.

Ekspansi Eropa di Asia Tenggara selalu dikaitkan dengan motif-motif

ekonomi yang berhubungan dengan eksploitasi hasil-hasil pertanian/perkebunan di wilayah-wilayah jajahannya untuk kepentingan pasar Eropa. Interpretasi ekonomis kerap kali digunakan untuk menerangkan ekspansi kolonial sebagai kepentingan kaum kapitalis yang akan menanam kelebihan modalnya atau kepentingan akan pasaran baru dan kepentingan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah yang sangat esensial bagi industri-industri ditanah airnya (Sartono Kartodirjo: 1990). Sejarah kolonisasi Belanda sejak kurun waktu sekitar abad ke 17 hingga awal abad ke 20 telah menciptakan dua kutub yang saling berlawanan, antara penjajah dan terjajah, pemilik modal dan petani, Eropa dan pribumi, ekonomi perdagangan dan ekonomi tradisional dan sebagainya. Polarisasi tersebut banyak menjadi topik penting dalam kajian-kajian historiografi post kolonial dan menciptakan tema-tema besar ‘gerakan-gerakan perlawanan petani/rakyat’ dalam tradisi penulisan sejarah di Indonesia.

Masalah agraria adalah tema sentral dalam kajian historiografi dibekas-bekas koloni Eropa. Periode kolonial di Asia Tenggara ditandai dengan hampir seluruh ketetapan mengenai biaya hidup dari pendapatan minimal, sementara itu disaat yang sama, komersialisasi ekonomi agraris selalu menghancurkan hampir seluruh bentuk-bentuk tradisional dari asuransi sosial (Scott: 1976). Studi-studi lokal mengenai pemberontakan petani, juga menjadi grand thema yang sangat populer dalam perkembangan historiografi Indonesia. *The Peasant's Revolt of Banten in 1888 Its Conditions, Course, and Sequel* yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo (1966) adalah sebuah karya masterpiece mengenai bentuk-bentuk perlawanan lokal terhadap

dominasi asing dalam sistem pertanian tradisional. *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa tahun 1850-1942* yang ditulis oleh Suhartono juga menjadikan masalah-masalah tentang ekonomi sebagai isu sentral dalam gerakan sosial politik di Indonesia. Para petani dalam hal ini tampil menjadi aktor dan kekuatan baru dalam gerakan perlawanan melawan kekuasaan asing.

Eksplorasi ekonomi disektor-sektor agraris menjadi dasar bagi berkembangnya wacana dari konsep ‘negara agraris’. Pemerintah kolonial dengan segala kebijakan politiknya berusaha memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik perkebunan di wilayah-wilayah Sumatra ataupun pertanian di Pulau Jawa, untuk kepentingan mereka. Revolusi Industri yang menjadi cikal bakal pertumbuhan wilayah-wilayah Eropa menuju industri maju, menuntut tersedianya banyak pasokan sumber daya alam untuk menunjang pertumbuhan manufaktur dan perdagangan.

Pemberontakan-pemberontakan petani tersebut pada dasarnya merupakan titik kulminasi dari politik agraria Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa yang dicanangkan oleh Van Den Bosch merupakan salah satu upaya pemerintah kolonial untuk menguras sektor pertanian dan memanfaatkan tenaga manusia untuk kepentingan industri. Rencana Van Den Bosch ialah bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami tanaman komoditas ekspor (kopi, tebu, dan nila khususnya) untuk dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah pasti. Dengan demikian, maka desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya dan Van Den Bosch memperkirakan bahwa hasil panen dari

20% (kelak 33%) bumi desa tersebut akan cukup memadai untuk tujuan itu (Ricklefs: 1991). Pemerintah kolonial sepanjang sejarah eksploitasinya diwilayah-wilayah jajahannya, menanamkan doktrin kedalam benak masyarakat pribumi, bahwa lahan pertanian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi subsisten petani yang harus digarap sepanjang hayat. Pertanian sudah merupakan budaya dari masyarakat agraris. Diwilayah-wilayah luar Jawa, terutama di Sumatra, perekrutan kuli-kuli perkebunan untuk tujuan industri berat pemerintah kolonial, merupakan sebuah eksploitasi sekaligus indoktrinasi dari 'konsep wilayah agraris' sekalipun sebagian dari penduduk pribumi tersebut hidup diwilayah-wilayah pesisir. Masyarakat pribumi hampir tidak pernah memikirkan sektor lain untuk membangun basis kekuatan ekonomi diluar sektor pertanian, karena tenaga mereka sudah habis tercurah diwilayah-wilayah perkebunan dan proyek-proyek pembangunan jalan kereta api.

III. Konsepsi Negara Kepulauan: Sejarah yang Terdistorsi

Siapun tidak dapat memungkirkan kenyataan bahwa Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Perairan laut di Indonesia meliputi 60 – 70 % luas dibanding wilayah daratannya. Wilayah-wilayah di Nusantara telah tumbuh dalam tradisi pelayaran dan perdagangan yang menghubungkan bangsa-bangsa dari seluruh dunia, berabad-abad sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Prasasti-prasasti tahun 683 dan 686 menunjukkan pada babakan penting tertentu dalam usaha Raja Jayanaga menaklukkan Melayu dan mungkin juga Taruma, dan pencipta politik yang

membuat Palembang sampai abad XIII menjadi pusat kekuatan kerajaan maritim di pulau-pulau itu (Hall: 1988). Berita-berita tersebut menunjukkan bahwa kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan di Palembang pada waktu itu telah tampil sebagai penguasa laut di Selat Malaka hingga selat Sunda dan menguasai perdagangan antar pulau. Tumbuh dan berkembangnya kekuatan maritim diperairan Nusantara, terus berlangsung hingga tahun 1293 – 1520 dengan munculnya Majapahit sebagai kekuatan dilautan yang telah menaklukkan bangsa-bangsa (Ibid).

Penguasa-penguasa lautan di kepulauan Nusantara tidak berakhir walaupun raksasa maritim Majapahit telah runtuh perlahan-lahan seiring proses Islamisasi di Asia Tenggara. Tradisi pelayaran dan perdagangan internasional semakin kuat dengan perkembangan Islam diwilayah-wilayah tersebut. Pada awal abad ke 13 teks-teks Cina (Zhufan Zhi karangan Zhao Rugun) memuat nama tempat Lan Wu Li atau Lan Li yang mengingatkan akan Lamuri. Pada akhir abad ke 13 Marcopolo singgah dipelabuhan-pelabuhan bagian Utara Sumatra dan memberitakan terdapatnya agama Islam dalam salah satu dari enam pelabuhan dagang yang nama-namanya: Ferlec, Basman, Sumatra, Dagroian, Lambri, dan Fansur (Lombard: 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi pelayaran telah dibangun berdasarkan faktor ekologis kelautan yang menjadi jalur penghubung kegiatan kegiatan perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan dikerajaan Malaka tidak hanya memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang muslim dari Arab, India, Cina, dan Persia untuk menyebarkan Islam dikepulauan Melayu. Kerajaan Malaka

(1400-1511) adalah sebuah kekuatan baru yang telah menunjukkan kedigdayaannya sebagai penguasa perairan. Sebuah sistem komplek dari rute-rute perdagangan telah membawa Malaka dari Barat ke Timur, dari Laut Merah dan Dataran Persia, kapal-kapal berlayar menuju pelabuhan Cambay di India, di kerajaan Gujarat. Disini bangsa-bangsa Persia, Arab, Armenia, dan Turki menjual sebagian dari hasil komoditas utama mereka seperti opium Arab, parfum, mutiara, dan menjual bahan-bahan lain seperti pakaian, tapestri, dan lain-lain. Di Malaka mereka menjual apa yang mereka bawa dan mengangkut kembali dengan pelayaran, hasil-hasil komoditas dari Malaka seperti kayu, rempah-rempah, porselen, damar, sutra, emas, perak, dan barang-barang lain, termasuk burung-burung dari Pulau Banda yang memiliki bulu-bulu untuk dipasarkan kepada orang-orang Arab dan Turki (Kennedy: 1964). Malaka berhubungan dengan perdagangan Mediterania dan Eropa, Timur Tengah dan Afrika Selatan (melalui Gujarat dan pelabuhan Laut Merah), India, sebagian wilayah Asia Tenggara dan Cina (Ibid hal. 6). Tom Pires dalam catatan perjalanannya menyebutkan “Orang tidak dapat memperkirakan kekayaan Malaka dalam perhitungan kebesaran dan pendapatannya. Malaka adalah sebuah kota yang telah dibuat untuk perdagangan, lebih kuat dari pada wilayah manapun didunia, dan memulai perdagangan lebih awal daripada yang lain” (Ibid, hal. 7). Sejarah kejayaan Malaka dipentas dunia berakhir pada tahun 1511 dibawah kepemimpinan Sultan Mahmud Shah. Portugis kemudian mengambilalih monopoli perdagangan diselat Malaka. Kisah kejayaan bangsa Melayu tidak berakhir sampai pada kejatuhan kerajaan Malaka. Aceh yang terletak diujung pulau Sumatra kembali

mencatat sejarah kejayaan tradisi pelayaran Nusantara dibawah Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636). Aceh yang memiliki kekuatan navigasi dan militer sangat tangguh telah mampu menggeser pengaruh Malaka dipanggung internasional melalui hubungan diplomatiknya dengan Turki, Cina, Persia, dan kerajaan-kerajaan di semenanjung Melayu. Aceh tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang disegani diantara bangsa-bangsa. Bahwasannya yang dibawa dunia Barat pada waktu itu seperti teknik pelayaran dan peperangan atau organisasi perdagangan, bukan hal yang baru, bahkan sudah lama dikenal oleh bangsa Asia. Perniagaan bangsa Barat tidak menunjukkan perbedaan tingkat dan membawa unsur-unsur baru, bahkan kemudian disesuaikan dengan perdagangan Timur (Sartono Kartodirjo: 1968).

Perkembangan teknologi navigasi dan pertumbuhan ekonomi perdagangan laut di Indonesia pada masa lampau, tidak hanya sebatas pada kepulauan Melayu saja. Pada awal abd 17, pantai Utara telah ditaklukkan. Sebelum masa itu Mataram telah berdiri menjadi bagian dari aktifitas perdagangan dipulau itu. Mataram membangun pesisir dalam sebuah model khusus Kerajaan Mataram dibangun hampir sepanjang pulau Jawa dari pusatnya dibagian Selatan Jawa Tengah (Van Niel: 2005). Para penguasa diwilayah-wilayah pantai adalah penguasa jalur-jalur perdagangan dunia. Bangsa Indonesia telah mebuiktannya selama berabad-abad sebelum kedatangan bangsa Eropa yang akhirnya mengubah secara frontal tradisi perdagangan dan pelayaran kesektor-sektor agraris. Monopoli perdagangan yang dilakukan kongsi-kongsi dagang Inggris (EIC) dan komgsi dagang Belanda (VOC) yang berujung kepada masa kolonial telah mengubur

hidup-hidup jiwa-jiwa petualang samudra yang diwariskan sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Samudra Pasai, Aceh Darussalam dan Mataram dipantai utara Jawa. Kepulauan Nusantara sebagai basis kekuatan ekonomi pelayaran dan maritim dikancah persaingan bangsa-bangsa dunia, telah tenggelam ditengah isu-isu agraria yang tidak pernah berujung dari masa kemasa. Disinilah tugas para sejarawan untuk merekonstruksi tradisi penulisan sejarah di Indonesia untuk pembangunan karakter bangsa.

Berpikir sejarah mengharuskan kita mempertemukan dua pandangan yang saling bertentangan,

1. Cara berpikir yang kita gunakan selama ini adalah warisan yang tidak dapat disingkirkan.
2. Jika kita tidak berusaha menyingkirkan warisan itu, mau tidak mau kita harus menggunakan 'presentisme' yang melihat masa lalu dengan kacamata masa sekarang (Wineburg: 2006).

Kurikulum pengajaran sejarah ditingkat sekolah atau sejarah sebagai kajian akademis, perlu meninjau kembali historiografi Indonesia dari berbagai perspektif, sehingga diharapkan dapat menjadi pembangunan jatidiri dan karakter bangsa. Penulisan sejarah tidak hanya terbatas pada isu-isu sentral, akan tetapi jauh kedepan dapat menjadi motivasi yang mendidik dalam membangun watak dan mental generasi-generasi Indonesia dimasa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Purwanto. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*. Yogyakarta: Ombak.

Grever, Maria and Stuurman. *Beyond The Canon History For Twenty-First Century*. Mac Millan: Palgrave

Hall, DGE. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional

Kennedy, J. 1964. *A History of Malaya*. Kuala Lumpur: Mac Millan and CO LTD.

Lombard, Denys. 2006. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of The Peasant Rebellion and Subsistence in South East Asia*. Haven and London: Yale University Press

Sartono Kartodirjo. 1966. *The Peasants' Rebellion of Banten 1888*. N.V. De Nederlandsche Boek Ensteendrukkerij.

Sartono Kartodirjo. 1968. *Lembaran Sedjarah No 2 Beberapa Fasal dari Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Jajasan Kanisius.

Sartono Kartodirjo. 1974. *Lembaran Sedjarah No 9 Metode dan Didaktik Sejarah*. Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM.

Sartono Kartodirjo. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid 2*. Jakarta: Gramedia

Suhartono. 1993. *Perbanditan Pedesaan di Jawa 1850 – 1942*. Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM

Van Niel, Robert. 2005. *Java's Northeast Coast 1740 – 1840 A Study in*

Colonial Enroachment and Dominance. Leiden: CNWS Publications

Vickers, Adrian. 2009. *Peradaban Pesisir Bali*: Penerbit Udayana Press.

Wineburg. 2006. *Berpikir Historis*. Jakarta: Obor.